

ABSTRAK

Efektivitas merupakan sesuatu yang dijadikan sebuah ukuran untuk melihat berlangsungnya suatu program. Pada tahun 2016 Presiden mengeluarkan Pepres No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Pepres tersebut dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungutan liar yang meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, serta terciptanya kepercayaan masyarakat dan pelayanan publik yang baik. Di Kota Lhokseumawe ada delapan kasus pungutan liar yang dilaporkan dan telah ditangani oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar tetapi hanya dua kasus yang terselesaikan hingga ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Kota Lhokseumawe serta melihat hambatan yang dialami dalam menjalankan program sapu bersih pungutan liar di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder. Dianalisis melalui proses reduksi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa program sapu bersih pungutan liar di Kota Lhokseumawe masih belum efektif dan hanya berjalan di tiga tahun pertama saja, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2019, untuk selebihnya program sapu bersih pungutan liar di Kota Lhokseumawe tidak berjalan secara efektif. Melihat dari aspek tepat waktu, memang tim saber pungli Kota Lhokseumawe menjalankan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta alur proses penanganan, dari aspek tepat sasaran ketika melakukan operasi tangkap tangan selalu tepat sasaran dan ketika melakukan sosialisasi juga tepat sasaran, sumber daya manusia yang terlibat juga ahli dibidangnya, namun yang menjadi hambatan ialah sumber daya yang berperan memiliki tugas ganda di instansi asalnya, serta kurangnya jumlah personel satgas pungli, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana mobilitas, telekomunikasi, serta kurangnya anggaran yang diberikan menyebabkan program sapu bersih pungutan liar tidak dapat berjalan secara efektif. Adapun saran yang diberikan ialah pemerintah Kota Lhokseumawe seharusnya memberikan anggaran yang cukup untuk pembuatan program, membayar honor, dan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang proses mobilitas, perangkat komunikasi, dan anggaran program.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Saber Pungli, Pelayanan Publik, Sumber Daya

ABSTRACT

Effectiveness is something that is used as a measure to see the progress of a program. In 2016, the President issued Presidential Decree No. 87/2016 on the Illegal Levy Clean Sweep Task Force. Based on the Presidential Decree, the Illegal Levy Clean Sweep Task Force was formed to eradicate illegal levies that are troubling and have a negative impact on society and the state, as well as the creation of public trust and good public services. In Lhokseumawe City, eight cases of illegal levies were reported and handled by the task force, but only two cases were resolved until the court. This study aims to look at the effectiveness of the illegal levies task force team program in Lhokseumawe City and see the obstacles experienced in running the illegal levies program in Lhokseumawe City. This research uses a descriptive qualitative approach, using primary data and secondary data. Analyzed through a data reduction process, as well as data presentation and conclusion drawing. From the research, it was found that the illegal levy clean sweep program in Lhokseumawe City was still not effective and only ran in the first three years, namely from 2016 to 2019, for the rest of the illegal levy clean sweep program in Lhokseumawe City did not run effectively. Looking at the timely aspect, indeed the Lhokseumawe City saber extortion team runs the program in accordance with the duties and responsibilities and the flow of the handling process, from the aspect of being right on target when conducting arrest operations is always right on target and when conducting socialization is also right on target, the human resources involved are also experts in their fields, but the obstacle is that the resources that play a role have double duties in their original agencies, as well as the lack of the number of extortion task force personnel, the lack of availability of mobility facilities and infrastructure, telecommunications, and the lack of budget provided cause the illegal levy clean sweep program to not run effectively. The advice given is that the Lhokseumawe City government should provide a sufficient budget for program creation, pay honoraria, and provide facilities that can support the mobility process, communication devices, and program budgets.

Keywords: Effectiveness, Program, Saber Pungli, Public Services, Resource

